

Media Komunitas dan Media Literacy

Pawito¹

Abstract: *This essay deals with community media in relation to media literacy. After a short discussion on a number of community media characters is made the essay goes further with somewhat detail theoretical presumptions of the roles of media community with respect primarily to the development as Amartya Sen mentioned about. The author suggests that community media may play some significant roles in the development including (a) disseminating information (from varieties of perspective), (b) facilitating public discussion, (c) helping to reach solutions of problems, (d) encouraging participations, and (e) encouraging the development of media literacy. Regarding the last point the author remarks that media community may have a dual-roles i.e facilitating community's member in media participation and facilitating community's member in media education.*

Key words: media komunitas (community media), cerdas media (media literacy), pembangunan (development).

Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa *media komunitas* (community media) merupakan jenis media (cetak maupun elektronik) yang hadir di dalam lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu dan dikelola oleh dan diperuntukkan bagi warga komunitas tertentu. Karakter utama dari media komunitas dengan demikian adalah (a) memiliki

¹ **Pawito**, adalah staf pengajar dan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

jangkauan terbatas (local), (b) menampilkan isi yang bersifat kontekstual mengacu kondisi komunitas, (c) pengelola serta target adalah orang-orang dari komunitas yang sama, dan (d) hadir dengan misi melayani - tidak ada orientasi mencari keuntungan modal (capital gain).

Konsep media komunitas sebenarnya tidak bersifat sama sekali baru. Banyak literatur mengenai komunikasi pembangunan yang terbit sekitar periode 1970 dan 1980-an menggunakan konsep ini yang seringkali dipadankan dengan media lokal (local media) dan pers lokal (local press) khusus untuk media cetak. Untuk konteks Indonesia penggunaan istilah media komunitas merupakan hal yang relatif baru. Pada periode 1970-an dan 1980-an konsep yang banyak digunakan dalam kaitan dengan pembangunan adalah pers daerah (vis a vis) pers pusat. Pers daerah adalah pers yang terbit dan beredar di daerah (umumnya propinsi) seperti *Pikiran Rakyat* (Bandung), *Suara Merdeka* (Jawa Tengah), dan *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta); sedangkan pers pusat (kadangkala juga disebut dengan pers nasional) adalah pers yang terbit (pada umumnya di Jakarta) namun memiliki jangkauan peredaran ke hampir seluruh wilayah negeri (secara relatif) seperti *Berita Buana* (ketika itu), *Merdeka* (ketika itu), *Kompas*, dan *Sinar Harapan* (ketika itu). Sebagian pers daerah pada periode ini memperoleh “titipan” dari pemerintah dalam bentuk proyek Koran Masuk Desa (KMD) yang memiliki tujuan terutama adalah menyebarluaskan informasi tentang pembangunan serta menggelorakan semangat partisipasi masyarakat.

Akhir-akhir ini, setelah periode reformasi berlalu, terdapat semacam dorongan untuk membangun dan nantinya memanfaatkan secara optimal media komunitas (termasuk pers komunitas) dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus partisipasi dalam pembangunan, terutama sekali, walau tidak secara khusus, pembangunan daerah. Hal demikian memberikan inspirasi untuk mengkaji lebih mendalam mengenai media komunitas terutama berkenaan dengan kemungkinan peran-peran yang dapat dimainkan di dalam masyarakat serta, secara agak khusus dibahas pada bagian tersendiri, peran media komunitas dalam mendorong tumbuhnya kondisi cerdas media (media literacy).

Media komunitas memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk dapat dijadikan tumpuan dalam upaya penyebarluasan informasi sekaligus menggelorakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama

pembangunan daerah. Hal demikian dikarenakan oleh beberapa karakter yang dimiliki oleh media komunitas sebagaimana telah dikemukakan di atas. Karakter-karakter termaksud secara teoritik dapat membawa beberapa konsekuensi penting seperti (a) *proximity*, (b) *empathy*, dan (c) interaksi (Pawito, 2007:1-2). Berkenaan dengan *proximity* yang dimaksudkan adalah bahwa peristiwa-peristiwa dan/atau persoalan-persoalan yang dipublikasi oleh media komunitas adalah berkenaan dengan warga masyarakat atau warga komunitas di dalam cakupan wilayah daerah tertentu di mana media bersangkutan berada. Hal demikian berarti unsur kedekatan (*proximity*) peristiwa dan/atau persoalan yang diberitakan di satu sisi dengan publik pembaca (dan/atau pendengar, pemirsa) di sisi lain sangat menonjol. Hal demikian lebih menjamin tingkat relevansi yang tinggi antara isi media dengan kebutuhan akan informasi (dan hiburan) pada publik warga komunitas.

Kemudian *empathy* menunjuk persoalan berkenaan dengan kecenderungan saling berbagi rasa dan perasaan. Dalam konteks media komunitas, hal demikian dapat terbentuk karena kesamaan kultur, tujuan-tujuan, serta kepentingan-kepentingan dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Keempat karakter yang dimiliki media komunitas seperti telah dikemukakan di atas memungkinkan terbinanya *empathy* antara media (pengelola media) dan publik warga komunitas karena baik pengelola maupun warga komunitas pada dasarnya adalah sama-sama orang yang memiliki orientasi kultur serta tujuan yang sama. Selanjutnya berkenaan dengan *interaksi* dapat dikatakan bahwa respon yang bersifat segera (*immediate feedback*) pada dasarnya agak sulit, khusus untuk media cetak. Kendati demikian, respon relatif segera lebih mungkin pada media komunitas oleh karena sifat lokal. Dalam hubungan ini warga komunitas dapat dengan mudah datang ke kantor media (atau mungkin menelpon) untuk mengemukakan saran-saran, masukan-masukan, atau mungkin keluhan-keluhan berkenaan dengan pemberitaan atau isi media secara lebih luas. Para pengelola secara relatif juga lebih mudah mengakomodasi saran-saran bersangkutan karena memiliki peluang *empathy* tinggi serta ketiadaan hambatan (*constraint*) manajerial yang berkaitan dengan upaya memperoleh keuntungan modal. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut maka media komunitas nampaknya memang dapat diharapkan perannya dalam pembangunan terutama pembangunan daerah.

PERAN MEDIA KOMUNITAS DALAM PEMBANGUNAN

Pemaknaan mengenai pembangunan barangkali memang diperlukan di bagian ini walau tidak perlu kiranya didiskusikan secara mendalam mengenai berbagai pandangan teoritik tentang pembangunan. Amartya Sen (1999) menawarkan saran mengenai pandangan tentang pembangunan yang lebih memanusiaikan manusia dengan memberikan penegasan bahwa pembangunan adalah sebagai kebebasan (*development as freedom*). Implisit dalam penegasan ini, karena pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses, bahwa pembangunan adalah juga merupakan upaya pembebasan. Kebebasan dan/atau upaya pembebasan yang dimaksud oleh Sen dalam hubungan ini adalah mencakup berbagai persoalan yang menyedihkan/menyakitkan termasuk kebebasan dari kelaparan (persoalan pangan), kebodohan (persoalan pendidikan), kemiskinan (persoalan kesempatan kerja dan upah kerja terkait dengan ongkos hidup), buruknya sanitasi (persoalan lingkungan), meluasnya berbagai jenis penyakit (persoalan kesehatan), diskriminasi (menyangkut hak-hak politik), dan berbagai bentuk gangguan dan ancaman (masalah keamanan dan kenyamanan) (Sen, :15-17).

Untuk upaya pembebasan dari hal-hal di atas Sen mengemukakan kata kunci yakni demokrasi (*democracy*). Demokrasi yang dimaksud oleh Sen di sini adalah demokrasi yang bukan hanya mementingkan segi-segi prosedural tetapi juga memberikan penekanan pada segi-segi moral dan etika. Dalam hubungan ini berlaku logika berpikir bahwa memang demokrasi tidak dengan sendirinya mampu meniadakan, misalnya, kelaparan; akan tetapi dengan demokrasi (misalnya unsur pers bebas) penyebab munculnya bahaya kelaparan dapat diidentifikasi sejak dini dan kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah bersama untuk mengatasinya. Dari sini dapat dikembangkan logika lebih lanjut misalnya bahwa apabila di dalam masyarakat terjadi kelaparan dan/atau gizi buruk maka ketika ini ada masalah dalam pembangunan, dan ini berarti juga ada masalah dengan demokrasi. Dalam hal ini demokrasi sebagaimana disarankan oleh Sen meniscayakan beberapa unsur penting seperti kebebasan (berorganisasi, menyatakan pendapat), kesederajatan, keadilan, supremasi hukum, dan kemakmuran. Berkenaan dengan hal yang terakhir ini dikemukakan penegasan bahwa pembangunan dan/atau demokrasi sedang dalam masalah apabila kemakmuran belum kunjung terwujud.

Penting sekali dikemukakan catatan dalam hubungan ini, bahwa semua sebagaimana baru saja disebutkan keberadaannya menyatu dalam budaya masyarakat sehingga pembangunan [dan demokrasi], bahkan juga pembangunan ekonomi, sebagaimana dikatakan oleh Soedjatmoko (1983:1-22) sebenarnya merupakan masalah kebudayaan. Dalam kaitan ini Soedjatmoko mengatakan bahwa dalam upaya pembangunan tidak selayaknya kita hanya mengoper saja alat-alat, cara-cara dan bentuk-bentuk susunan produksi dari luar. Langkah-langkah kreatif dengan mengacu dan berpijak pada kondisi-kondisi masyarakat serta nilai-nilai budaya yang ada sangat diperlukan dalam hal ini. Selanjutnya Soedjatmoko mengatakan sebagai berikut.

Semuanya ini akhirnya harus menjadi darah-daging kita sendiri; ia harus menjadi alat-alat dan cara-cara kita memenuhi kebutuhan kita sendiri; menjadi penjelmaan kebudayaan kita sendiri. Dalam pada itu intisari persoalan yang kita hadapi ialah mencari asas-asas dinamik kita sendiri yang otonom, artinya yang dapat berkembang menurut hukum-hukum pribadi [bangsa] kita sendiri berkat kekuatan kita sendiri (Soedjatmoko, 1983:9).

Apa yang dikemukakan oleh Soedjatmoko sebagaimana dikutip di atas memberikan penegasan akan keyakinan bahwa pembangunan nasional pada akhirnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa kita sendiri, untuk pengembangan harkat dan martabat bangsa kita sendiri, dan bukan untuk suatu pengabdian dan/atau penghambaan kepada kepentingan bangsa lain. Kemandirian bangsa selanjutnya menjadi sebagian dari kata kunci orientasi pembangunan, yang dalam hal ini tidak lain adalah kebebasan. Dalam kaitan ini dapat kiranya dikemukakan penegasan bahwa apabila ada kecenderungan yang semakin tinggi akan ketergantungan yang kuat pada bangsa kita kepada bangsa lain, yang berarti rendahnya kecenderungan otonom, maka hal ini mengindikasikan rendahnya kebebasan yang dimiliki bangsa kita yang berarti juga rendahnya kualitas hasil pembangunan.

Dalam konteks pembangunan daerah, berkenaan apa media komunitas terutama memiliki signifikansi, maka upaya pemberdayaan dan aktualisasi potensi-potensi lokal menjadi hal yang sangat utama. Pembangunan daerah dengan demikian tidak harus diartikan sebagai

kemandirian masyarakat suatu daerah (atau para warga suatu komunitas) – dalam arti tidak memiliki ketergantungan dengan daerah lain (atau dengan para warga komunitas lain) tetapi yang lebih penting adalah apresiasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi dan produk-produk lokal (daerah) demi lebih tercukupinya kebutuhan warga daerah. Pembangunan daerah dengan demikian diharapkan dapat memperkokoh nilai-nilai budaya lokal (daerah) yang selanjutnya juga dapat memperkokoh nilai-nilai dan identitas budaya bangsa.

Bertolak dari berbagai pemikiran sebagaimana telah dikemukakan maka peran media komunitas dapat dikembangkan dengan memberikan titik berat terutama pada:

1. *Informasi*

Peran ini berkenaan dengan peran media komunitas dalam upaya penyebarluasan informasi dan pengetahuan mengenai gerak dan laju pembangunan dengan mengindahkan keragaman perspektif. Suatu peristiwa diberitakan bukan hanya dari sisi kepentingan pemerintah tetapi juga kepentingan rakyat banyak, bukan hanya dari sisi kepentingan kelompok dominan tetapi juga kelompok minoritas dari warga komunitas.

2. *Forum diskusi publik*

Dalam hal ini media komunitas diharapkan memiliki peran yang nyata dalam memfasilitasi berkembangnya diskusi publik (di antara warga komunitas) berkenaan dengan persoalan-persoalan penting yang berkenaan dengan warga komunitas serta persoalan-persoalan lain yang lebih luas yakni menyangkut hubungan atau interaksi warga komunitas dengan warga lain bahkan juga urusan atau persoalan nasional.

3. *Membantu mencapai kesepakatan untuk mengatasi persoalan*

Sangat disarankan bahwa lacakan jurnalistik media komunitas lebih mengedepankan pencapaian jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi bersama dalam masyarakat (problem-solving oriented). Hal demikian dapat dilakukan misalnya dengan cara pemilihan sumber yang berimbang di antara kelompok-kelompok kepentingan dan/atau kelompok kekuatan dalam masyarakat/komunitas seraya tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang ada seperti misalnya *sitik pada eding*, *aja leluwihan*, *aja dumeh*, dan *tepo seliro*.

4. Menggelorakan semangat partisipasi

Upaya pembangunan, termasuk pembangunan daerah mutlak memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Dalam hubungan ini terdapat suatu postulat yang mengatakan bahwa *rakyat tidak akan bersedia berjuang dan berkorban untuk pembangunan, kecuali apabila ia yakin akan tujuan pembangunan itu* (Kadir, 1983). Mengacu pada konteks sekarang maka postulat ini barangkali dapat sedikit diubah menjadi: *rakyat tidak akan mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan sampai mereka meyakini manfaat dari pembangunan.*

Postulat-postulat ini menyiratkan beberapa hal menarik, yaitu:

1) Bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan suatu gerakan yang membutuhkan partisipasi; 2) Bahwa partisipasi dalam pembangunan bersifat sukarela (tidak bersifat paksaan); 3) Bahwa rakyat atau masyarakat, supaya mau berpartisipasi, harus dibuat mengetahui dan meyakini manfaat-manfaat pembangunan; 4) Bahwa semua pihak (pemerintah dan masyarakat) harus saling bekerjasama dengan sinergis dan harmonis. Hal demikian hanya mungkin kalau semua pihak bekerja dan/atau melayani dengan hati.

CERDAS MEDIA (MEDIA LITERACY)

Selain keempat peran sebagaimana dibicarakan sebelumnya maka masih ada satu peran lagi yang masih dapat diharapkan sehubungan dengan keberadaan media komunitas yakni meningkatkan *cerdas media (media literacy)* di kalangan warga masyarakat atau komunitas. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Partisipasi dalam pembangunan sebagai implisit terkandung dalam beberapa postulat di atas dapat dikatakan merupakan hasil dari proses tumbuh-kembangnya kognisi (meningkatnya pengetahuan), afeksi (tumbuhnya keyakinan), dan perilaku (adanya tindakan bersama yang sinergis dan harmonis) di dalam masyarakat. Pada tataran praktis, terkait dengan keberadaan media komunitas, hal demikian menunjuk aktualitas peran media komunitas dalam mendorong tumbuhnya cerdas media (*media literacy*) di dalam masyarakat. Artinya, tumbuhnya media komunitas bukan hanya dapat mendorong peningkatan partisipasi tetapi juga mendorong meningkatnya cerdas media di kalangan warga

masyarakat atau komunitas.

Dalam hubungan ini konsep *cerdas media (media literacy)*, sebagaimana digunakan dalam berbagai kajian ilmiah sering diartikan sebagai kemampuan menganalisis dan mengapresiasi karya-karya literatur dan karya-karya budaya yang disebarluaskan melalui media massa serta kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan menggunakan media massa untuk berbagai maksud dan tujuan (Brown, 1998:44). Pengertian demikian mencakup dua dimensi kemampuan sekaligus. Dimensi *pertama* berkenaan dengan kemampuan individu-individu warga masyarakat dalam mengkonsumsi media (kemampuan menggunakan media dalam pengertian sebagai audience); dan *kedua* berkenaan dengan kemampuan menggunakan media untuk mencapai tujuan (kemampuan menggunakan media dalam pengertian sebagai komunikator).

Berkenaan dengan dimensi pertama maka karya-karya yang dianalisis dan diapresiasi meliputi bentuk-bentuk karya sastra, buku-buku dengan beragam karakter, karya jurnalistik, berbagai paket acara siaran radio dan televisi, dan bahkan berbagai bentuk publikasi melalui internet. Kemudian berkenaan dengan dimensi kedua maka kemampuan-kemampuan yang dimaksud mencakup hal-hal seperti menulis surat pembaca, menulis berbagai bentuk artikel surat kabar atau majalah (laporan jurnalistik, feature, essay opini), membuat karya fotografi untuk dimuat di media, membuat paket siaran radio atau televisi yang bersifat sederhana (misalnya laporan perjalanan, kesaksian mengenai suatu peristiwa, drama, feature), dan berpartisipasi dalam berbagai pertukaran informasi melalui internet serta mendesain *homepage*.

Bertolak dari pemahaman mengenai cerdas media sebagaimana dikemukakan maka kehadiran media komunitas sangat diharapkan untuk dapat membawakan peran-peran tertentu. Dalam kaitan ini peran yang dimaksud mencakup setidaknya dua hal: (a) tumbuhnya media komunitas memfasilitasi berkembangnya cerdas media, dan (b) media komunitas dapat digunakan sebagai sarana atau forum untuk melakukan pendidikan media (media education). Hal pertama menunjuk keberadaan media komunitas sebagai ajang untuk mengembangkan kreativitas mengembangkan kemampuan menggunakan media dalam pengertian warga komunitas sebagai komunikator. Warga komunitas dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam media komunitas. Karya-karya yang dihasilkan oleh warga

komunitas dapat dipublikasikan oleh atau melalui media komunitas yang ada.

Kemudian hal yang kedua menunjuk pemanfaatan media komunitas untuk menuntun, membimbing dan mendiskusikan berbagai hal berkenaan dengan upaya peningkatan cerdas media. Dengan kata lain media komunitas dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan media. Berbagai pengalaman (termasuk pengalaman yang ada pada masyarakat atau bahkan bangsa lain) dapat saling dibagi dengan atau melalui media komunitas, dan berbagai petunjuk atau saran-saran menyangkut dimensi kedua dari penggunaan media seperti di atas telah dikemukakan dapat disampaikan, dan bahkan berbagai persoalan penting menyangkut cerdas media dapat didiskusikan di antara sesama warga komunitas. Berbagai persoalan penting yang dimaksud dapat meliputi tujuh hal penting sebagaimana disarankan oleh Hobbs (1998:16-32) sebagai berikut.

1. Apakah tidak sebaiknya pendidikan media (media education) diarahkan untuk melindungi anak-anak dan para remaja dari pengaruh-pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh media massa?
2. Apakah tidak sebaiknya produksi media merupakan hal yang esensial dalam pendidikan cerdas media.
3. Apakah tidak sebaiknya cerdas media mengambil fokus pada budaya pop?
4. Apakah tidak sebaiknya cerdas media memiliki agenda politis dan/ atau ideologis yang lebih eksplisit?
5. Apakah tidak sebaiknya cerdas media dikembangkan dengan fokus pendidikan lingkungan berbasis sekolah?
6. Apakah tidak sebaiknya cerdas media diajarkan sebagai suatu mata pelajaran (subject) tersendiri atautkah terintegrasikan dengan mata pelajaran lain yang ada.
7. Apakah tidak sebaiknya pengembangan cerdas media memperoleh bantuan dana dari organisasi atau industri media?

Ketujuh persoalan sebagaimana baru saja dikemukakan nampaknya memang menjadi persoalan penting yang harus dipecahkan dalam upaya mendorong tumbuhnya cerdas media di kalangan masyarakat. Dikemukakan catatan dalam hubungan ini bahwa ada kemungkinan antara masyarakat

atau komunitas yang satu dengan yang lain tidak sama dalam memecahkan masalah ini. Hal demikian sebagian dipengaruhi oleh kondisi-kondisi masyarakat yang ada termasuk kondisi industri media (private media) yang ada. Dalam kaitan ini terdapat kemungkinan pula untuk diupayakan kerjasama antara masyarakat/komunitas dengan pemerintah menyangkut beberapa persoalan misalnya yang menyangkut persoalan nomor 1, 4, dan 7.

Walau tidak seluruh komunitas (tergantung jenis komunitas) yang ada pada masyarakat di berbagai wilayah daerah di Indonesia memiliki kesulitan dalam hal biaya untuk membangun media komunitas namun jelas bahwa komunitas-komunitas tertentu di berbagai wilayah daerah sangat membutuhkan uluran bantuan dana untuk kepentingan ini. Dalam kaitan ini pembentukan/pembangunan infra struktur media komunitas misalnya berbentuk paguyuban-paguyuban komunitas dapat diupayakan mengawali semuanya dan baru ajakan kerjasama disampaikan. Pemerintah dalam kaitan ini tidak perlu banyak mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan cerdas media kecuali sejauh yang diminta untuk dipecahkan bersama dengan komunitas. Dengan kata lain pemerintah dalam kaitan ini lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Pijakan pemikiran filosofis yang lebih selayaknya digunakan dalam kaitan ini adalah bahwa pemerintah bertanggungjawab akan tumbuh berkembangnya cerdas media di kalangan masyarakat namun pemerintah bukan pihak yang lebih tahu akan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Masyarakat atau komunitas-komunitas yang bersangkutan yang lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingannya sendiri.

KESIMPULAN

Mengakhiri telaah ini dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut. *Pertama*, bahwa cerdas media nampaknya semakin menjadi kebutuhan dalam pembangunan bangsa dan masyarakat kalau dasar pemikiran mengenai pembangunan yang diambil lebih bersifat memanusiakan manusia. Dalam berbagai hal nampak bahwa esensi pengembangan cerdas media di dalam masyarakat sebagai suatu kebutuhan dalam pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat.

Kemudian *kedua*, bahwa media komunitas diharapkan memiliki peran-peran yang nyata dalam pembangunan termasuk pembangunan daerah. Peran-peran tersebut meliputi penyebarluasan informasi dari beragam perspektif mengenai berbagai peristiwa penting termasuk dan terutama peristiwa lokal, menyediakan diri sebagai forum diskusi publik terutama menyangkut persoalan-persoalan komunitas, membantu atau mendorong terciptanya penyelesaian bagi persoalan-persoalan yang timbul atau dihadapi bersama masyarakat, membantu mendorong atau menggelorakan semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan membantu mendorong tumbuh-kembangnya cerdas media di dalam masyarakat.

Selanjutnya yang terakhir adalah bahwa kajian-kajian empirik mengenai cerdas media terkait dengan berbagai hal termasuk misalnya pembangunan dan demokrasi nampaknya semakin dibutuhkan sebagai hal yang esensial dalam diskusi publik mengenai upaya-upaya meningkatkan cerdas media di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, James A., "Media Literacy Perspectives", *Journal of Communication*, edisi Winter 1998.
- Hobbs, Rene, "The Seven Great Debates in the Media Literacy", *Journal of Communication* edisi Winter 1998.
- Kadir, Abdul, "Konsep Strategi Penerangan Pembangunan" – Ceramah Drs.H. Abdul Kadir Sekretaris jenderal Departemen Penerangan di depan peserta Rapat Kerja Koran Masuk Desa di Surakarta tanggal 10 September 1983.
- Pawito, "Eksistensi Media Komunitas Cetak: Perspektif Sosialisasi Pembangunan Daerah" – makalah disajikan di depan forum Workshop Media Komunitas oleh BIKK Propinsi Jawa Tengah di Salatiga, Rabu 27 Juni 2007.
- Sen, Amartya. 1999. *Development As Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Soedjatmoko. 1983. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.